

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kemiskinan

###### a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Kemiskinan bersifat multidimensial, yang berarti kebutuhan manusia bermacam-macam sehingga terdapat banyak aspek dalam kemiskinan. Aspek primer berupa miskin akan asset, organisasi social politik dan pengetahuan, serta ketrampilan. Aspek sekunder berupa miskin jaringan social, sumber-sumber keuangan dan informasi, dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasi dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan sehat, perawatam kesehatan yang kurang baik dan rendahnya tingkat pendidikan (Sukirno, 2006).

Kemiskinan menurut *World Bank* adalah keadaan dimana seorang atau kelompok yang tidak memiliki pilihan-pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya. Sedangkan pengertian kemiskinan menurut Badan Pusat

Statistik (BPS) adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, pendidikan serta kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan dan memiliki standar tertentu dan diukur melalui sisi pengeluaran.

Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan banyaknya jumlah pengangguran sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar sesama penduduk, kemiskinan dapat di definisikan dimana kondisi kehidupan seseorang dalam standar yang rendah. Konsep-konsep kemiskinan adalah sebagai berikut (Saragih, 2014).

#### 1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut digolongkan dalam 2 macam yaitu kemiskinan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kemiskinan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

#### 2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif di definisikan sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Indonesia sendiri merupakan negara berkembang permasalahan kemiskinan yang belum terselesaikan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan (Nasikun dalam Suryawati, 2005)

a. Pelestarian proses kemiskinan (*policy induces processes*)

Proses kemiskinan yang dilestarikan, diproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.

b. Pola produksi colonial (*socio-economi dualism*)

Negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi colonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

c. Pertumbuhan penduduk (*population growth*)

Perspektif yang didasari pada teori malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedang penambahan pangan seperti deret hitung.

d. Manajemen sumber daya alam dan lingkungan (*recources management and the environment*)

Adanya unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan seperti manajemen pertanian asal tebang akan menurunkan produktifitas.

e. Kemiskinan terjadi karena siklus alam (*natural cycles and processes*)

Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan

mengalami kekeringan sehingga tidak terjadi produktifitas yang maksimal dan terus-menerus.

f. Peminggiran kaum perempuan (*the marginalization of woman*)

Dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah disbanding kaum laki-laki.

g. Faktor budaya dan etnik (*cultural and ethnic factors*)

Bekerjanya faktor budaya dan etni yang memelihara kemiskinan seperti pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

**b. Lingkaran Kemiskinan**

Lingkaran kemiskinan merupakan suatu jalinan atau hubungan yang tidak jelas mana sebab mana akibat dan tidak berujung pangkal (Hudiyanto, 2014).

*“lingkaran kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan negara miskin atau orang miskin tetap berada dalam keadaan miskin”.*

Menurut nurse terdapat 2 lingkaran setan kemiskinan yaitu dilihat dari sisi penawaran dan dari sisi permintaan :

1. Dilihat dari sisi penawaran

Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan oleh produktivitas masyarakat yang rendah. Hal ini menyebabkan kemampuan menabung rendah dan kemudian akan menyebabkan kekurangan modal, kurangnya modal menyebabkan investasi rendah dan akan berdampak pada penawaran rendah pula, sehingga terjadilah kemiskinan.

2. Dilihat dari sisi permintaan

Karena miskin, maka permintaan mereka rendah, produksi yang rendah menyebabkan pendapatan rendah, pendapatan rendah menyebabkan daya beli juga rendah, rendahnya daya beli menyebabkan kekurangan modal, kekurangan modal menyebabkan investasi dalam negeri juga rendah, investasi yang rendah menyebabkan permintaan rendah, permintaan rendah mengakibatkan terjadinya kemiskinan.

**c. Ukuran Kemiskinan**

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan

dasarnya (*basic need approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapitanya per bulan dibawah garis kemiskinan.

Terdapat beragam ukuran mengenai garis kemiskinan, menurut Bank Dunia (*World Bank*) pada tahun 1970-an menggunakan nilai pendapatan yang disetarakan dengan dollar sebagai ukurannya. Garis kemiskinan untuk perkotaan ditetapkan 75 dollar amerika, sedangkan untuk daerah pedesaan ditetapkan 50 dollar amerika perkapita per tahun. Namun akhir-akhir ini Bank Dunia (*World Bank*) menggunakan ukuran lain yaitu pendapatan senilai AS \$1 per hari sebagai garis kemiskinan, atau kadang menggunakan AS \$2 perhari.

Penetapan garis kemiskinan dalam masyarakat yaitu dimana pendapatan perhari 7.057 rupiah per orang. Penetapan jumlah tersebut berasal dari perhitungan jumlah garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makan digunakan 2.100 kilo kalori perkapital perhari. Sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan bukan makanan seperti untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan paket kebutuhan dasar bukan makanan diwakili

oleh 51 jenis komoditi untuk daerah perkotaan dan 47 jenis komoditi untuk daerah pedesaan (Saragih, 2014).

## **2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan total yang diperoleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh atas faktor-faktor produksi asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestic atau nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun (mankiw, 2003).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pruduk Regional Domestik Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu GDP atau output total dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita yaitu output total dibagi dengan jumlah penduduk (Boediono, 2008).

Pengukuran akan kemajuan perekonomian suatu daerah menggunakan alat ukur pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

**a. Produk Domestik Bruto (PDB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan disajikan dalam harga pasar. PDB dan PDRB merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi yang bersifat global dan bukan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena PDB dan PDRB belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sebenarnya, sejatinya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk dinegara atau daerah.

**b. Produk Domestic Bruto (PDB) perkapita atau Pendekatan perkapita**

PDB perkapita atau PDRB perkapita dalam skala daerah merupakan alat pengukur ekonomi yang baik karena lebih tepat dan dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu Negara atau daerah tertentu, alat pengukur ini juga disebut PDB atau PDRB rata-rata.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran perekonomian secara menyeluruh di suatu daerah. Perekonomian daerah merupakan peningkatan pendapatan penduduk



secara keseluruhan dengan kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi pada daerah tersebut dan dilakukan perhitungan nilai harga berlaku akan tetapi untuk melihat lebih lanjut setiap tahun maka harus dinyatakan dengan bentuk riil atau dibentuk dengan harga konstan.

Nilai PDRB atau pendapatan perkapita diperoleh dari berbagai pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada suatu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut (Sadono Sukirno, 1978).

$$\mathbf{a. \textit{PerkapitaPNB}} = \frac{\mathit{Pendapatan Nasional Bruto}}{\mathit{Jumlah Penduduk}}$$

$$\mathbf{b. \textit{PerkapitaPDB}} = \frac{\mathit{Pendapatan Domestik Bruto}}{\mathit{Jumlah Penduduk}}$$

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator penting guna mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam waktu tertentu umumnya satu tahun. Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin besar jumlah pendapatan per kapita masyarakat dapat berpengaruh positif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) angka PDRB suatu daerah dapat di peroleh dan dihitung menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

### **1. Pendekatan Produksi**

Pendekatan produksi digunakan untuk menghitung nilai tambah barang dan jasa yang di produksi oleh segala kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya dari masing-masing total produksi bruto pada setiap sector atau subsector. Pendekatan ini banyak digunakan pada perkiraan perkiraan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan produksi yang berupa barang. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipake oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas faktor produksi dalam proses produksi.

Dalam menghitung pendapatan nasional maupun pendapata regional di Indonesia dari sisi produksi terdiri dari Sembilan sector ekonomi/lapangan usaha yang dijumlahkan yaitu:

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri
4. Sektor Listrik Gas dan Air bersih

5. Sektor Bangunan dan Konstruksi
6. Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa-jasa

## **2. Pendekatan Pendapatan**

Pendekatan pendapatan menghitung dengan nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak angsung neto. Penjumlahan semua komponen ini disebut NTB, surplus usaha tidak di perhitungkan untuk mencari surplus. Surplus usaha adalah bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode 21 pendekatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa seperti pada subsector pemerintahan umum. Hal ini disebabkan tidak tersedianya atau kurangnya data mengenai nilai produksi dan biaya antara (production account) (Robinson Tarigan, 2005).

## **3. Pendekatan Pengeluaran**

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan social, pembentukan modal dan ekspor. Mengingat

nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestic, total pengeluaran dari komponen-komponen diatas harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud disini adalah nilai ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

### **3. Upah Minimum**

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, maka upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau karyawan beserta keluarganya dengan wajar. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau perundang-undangan serta dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerjanya termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha. Upah diberikan oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha (Sonny Sumarsono, 2003).

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya.

Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006). Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk makanan, kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Upah minimum berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan pekerja yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya. Upah minimum ditentukan oleh setiap provinsi pada tahun 2001 dimana sebelumnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk wilayah-wilayah di Indonesia. Upah minimum dibagi menjadi 2 yaitu upah minimum regional dan upah minimum sektoral.

#### 1. Upah minimum Regional

Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.

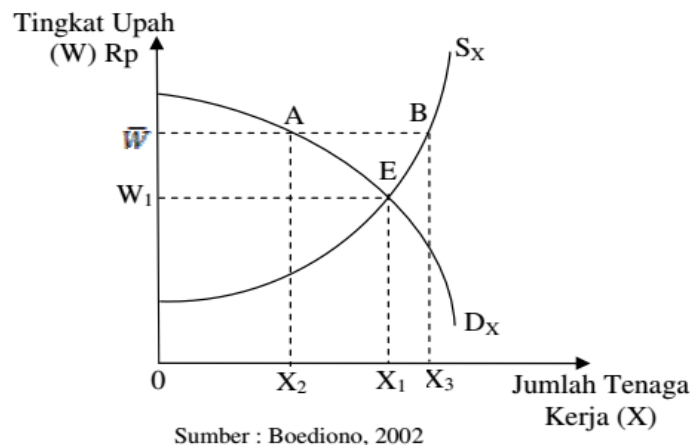
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang upah minimum, Upah Minimum Regional (UMR) dibagi menjadi 2 yaitu Upah Regional Tingkat 1 (UMR Tk.1) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Namun saat ini peraturan ini diubah setelah muncul pembaruan tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999. Upah Minimum Regional Tingkat 1 (UMR Tk. 1) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM Kab/Kota).

## 2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999. Upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Tingkat I (UMS Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Tingkat II (UMS Tk. II). Namun adanya pembaruan peraturan Menteri Tenaga Kerja maka diubah dari Upah Minimum Sektoral Tingkat I (UMS Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Tingkat II (UMS Tk. II) menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kab/Kota).

Gambar 2.1

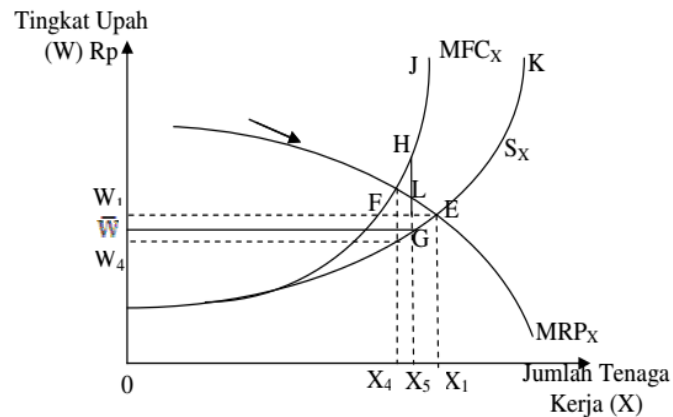
### Penetapan Upah Minimum di Pasar Tenaga Kerja



Gambar 2.1 diatas menjelaskan penetapan upah minimum yang di lakukan pada pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Sebelum ada peraturan yang berlaku, tingkat upah minimum adalah  $W_1$  dan jumlah orang yang bekerja adalah  $OX_1$  (keseimbangan ada pada titik E). setelah di berlakukannya peraturan upah minimum  $\bar{W}$  maka tingkat upah tidak bisa turun dibawah  $\bar{W}$  dan akan mengakibatkan permintaan tenaga kerja turun ke  $OX_2$ ,  $OX_3$  adalah jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat upah yang lebih tinggi harus dibayarkan dengan ongkos social  $X_2X_1$  dimana yang semula bekerja sekarang kehilangan pekerjaan (Boediono, 2002).

Gambar 2.2

### Penetapan Upah Minimum di Pasar Monopsoni



Sumber: Boediono 2002

Pasar monopsoni adalah dimana hanya ada satu perusahaan untuk bekerja di suatu daerah. Posisi keseimbangan ada pada titik F. tingkat upah  $W_4$  dan jumlah orang yang di pekrjakan  $OX_4$ . Apabila Peraturan Upah Minimum  $\bar{W}$  ditetapkan, maka kurva penawaran tenaga kerja menjadi garis patah-patah  $\bar{W}GEK$ .

#### 4. Pendidikan

Menurut pusat bahasa departemen pendidikan nasional, pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tata cara seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sedangkan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana



untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenjang pendidikan yaitu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Tolak ukur dan indikator pendidikan yang tertera dalam UU No. 20 tahun 2003 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang memiliki struktur berjenjang. Terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berikut adalah jenjang dalam pendidikan formal :
  - a. Pendidikan dasar : jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah, pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
  - b. Pendidikan menengah : merupakan jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan

menengah berupa Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat.

- c. Pendidikan tinggi : merupakan jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah, pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan diselenggarakan dengan system terbuka. Perguruan tinggi berupa akademi, sekolah tinggi, politeknik, institute, dan universitas.
2. Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diadakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti dan pelengkap pendidikan formal. Pendidikan nonformal berbentuk kecakapan hidup, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan peserta didik.
3. Pendidikan informal : merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Faktor yang mendorong dan berpengaruh terhadap pendidikan menurut Hisbullah (2001: 63) adalah sebagai berikut :

a. Ideology

Seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan.

b. Sosial Ekonomi

Semakin tinggi tingkat ekonomi mendorong seseorang mencapai pendidikan yang lebih tinggi.

c. Sosial Budaya

Kesadaran orang tua dalam memahami pentingnya pendidikan bagi anak seharusnya lebih ditingkatkan karena sejatinya pendidikan merupakan investasi untuk berkompetisi di masa dewasa.

d. Perkembangan IPTEK

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang untuk memperbarui pengetahuan dan ketrampilan.

e. Psikologi

Konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.

Pendidikan dalam penelitian ini menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Menurut kumalasari (2011) rata-rata lama sekolah mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin

tinggi pula rata-rata lama sekolah. Dengan kata lain semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas dan pola pikir seseorang.

## **B. Hubungan variabel independen terhadap variabel dependen**

### **1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap**

#### **Kemiskinan**

Dalam proses pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau wilayah PDRB merupakan hal yang sangat penting karena peningkatan PDRB akan mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Namun apabila pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang memadai maka akan terjadi ketimpangan pendapatan dan pengangguran sehingga akan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Menurut Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur oleh laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, namun harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang menikmati hasilnya. Menurunnya PDRB suatu daerah berakibat pada konsumsi rumah tangga, apabila tingkat pendapatan penduduk rendah maka banyak rumah tangga miskin terpaksa mengubah pola hidupnya, baik dari segi makanan ataupun keseharian yang di minimalkan.

## **2. Hubungan Upah Minimum terhadap Kemiskinan**

Upah minimum berfungsi guna memenuhi standar minimum kehidupan seperti kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja sehingga dengan adanya upah minimum diharapkan akan mengangkat masyarakat yang berpendapatan rendah.

Menurut Jundi (2014), semakin meningkatnya upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka akan mengurangi tingkat kemiskinan.

## **3. Hubungan Pendidikan terhadap Kemiskinan**

Menurut Jundi (2014) semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin besar pua kemampuan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang berkualitas sehingga pendapatan menjadi lebih maksimal. Pendapatan yang tinggi akan menghindarkan seseorang dari lingkaran kemiskinan.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka dalam sisi ketrampilan, keahlian dan pengetahuan juga meningkat sehingga mendorong produktivitas individu tersebut. Dikutip dari Kumalasari (2011), perusahaan akan memperkerjakan tenaga kerja yang memiliki produktifitas tinggi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih

tinggi dan memberikan upah tinggi kepada pekerja yang berproduktivitas tinggi. Sehingga seseorang yang memiliki produktivitas tinggi akan memperoleh kesejahteraan dan terhindar dari kemiskinan.

### C. Penelitian Terdahulu

1. Wisnu Adhi Saputra (2011) “ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, IPM, PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH”

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran. Model regresi yang digunakan adalah metode analisis linier berganda dengan menggunakan panel data dan menggunakan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan seluruh variabel independen secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Nilai R-squared sebesar 0.609 yang berarti sebesar 60,9% variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan 39,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Variabel Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Variabel PDRB dan IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. Sedangkan untuk variabel pengangguran berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Jawa Tengah.

2. Okta Ryan Pranata Yudha (2013) “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2009-2011”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan di Indonesia, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2009-2011, sedangkan variabel upah minimum dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

3. Siti Mu’amala (2017) “DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2008-2014”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan yang mempengaruhi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2008-2014. Dimana kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen (mempengaruhi) adalah Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), Pengangguran, Jumlah penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode Analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY. Sedangkan variabel pengangguran dan Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

4. Priyo Adi Nugroho (2015) “PENGARUH PDRB, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1999-2013”

Penelitian ini menggunakan variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendidikan, dan pengangguran. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah Kemiskinan. Objek dari penelitian ini yaitu di kota Yogyakarta dan pada periode 1999-2013. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY. Menggunakan metode analisis data deskriptif.



Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel Produk Domestik regional Bruto (PDRB) dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang negative dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut mempengaruhi kemiskinan di kota Yogyakarta pada tahun 1999-2013.

5. Sari Zulfiana Hasan (2017) “ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA TAHUN 2010-2015”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan pada kota/kabupaten di provinsi NTT pada tahun 2010-2015. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi data panel dengan Random Effect Model. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi NTT.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kemiskinan di NTT dapat dijelaskan oleh Belanja Daerah, PDRB, dan IPM sebesar 37,21%.

Sedangkan sisanya yaitu 62,79% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Variabel Belanja Daerah berpengaruh signifikan pada tingkat 5% dengan nilai probabilitas 0,0000 dan berpengaruh negative dengan koefisien yang diperoleh sebesar -0,112978. Variabel PDRB berpengaruh signifikan pada tingkat 5% dengan nilai probabilitas 0,0012 dan berpengaruh positif dengan koefisien 0,185600. Sedangkan variabel IPM berpengaruh signifikan pada tingkat 5% dengan nilai probabilitas 0,0383 dan berhubungan negative dengan koefisien sebesar 0,009963.

6. Adit Agus Prasetyo (2010) “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2007)”

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Tingkat Pengangguran. Objek dari penelitian ini di 35 kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2003-2007 yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karenanya

perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

7. Dwi Arini Miswanda (2017) “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015)”

Penelitian ini dilakukan di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015. Variabel independen yang digunakan adalah Pendidikan, pengangguran, upah minimum, dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil dari penelitian ini adalah variabel pendidikan, upah minimum dan kesehatan berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

8. Augustine Addo (2012) “*Internasional Journal of Bisnis dan Manajemen, Keuangan Mikro sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Negara Ghana*”

Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari dukungan lembaga keuangan mikro pada kemungkinan penduduk miskin di kota metropolitan Ghana.

Keuangan mikro sangat penting dalam pembangunan negara serta membantu mengentaskan kemiskinan. Hasil dalam penelitian ini mayoritas responden melaporkan peningkatan pendapatan mereka yang telah meningkatkan standar hidup mereka. Sehingga mengurangi tingkat kemiskinan responden baik secara sosial maupun ekonomi.

9. Osinubi (2005) “Analisis Hubungan makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di Nigeria”

Penelitian ini menggunakan data *time series* dengan periode 31 tahun yaitu dari tahun 1970-2000, dan menerapkan pendekatan 3SLS. Hasil dalam penelitian ini adalah pada saat pengangguran meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hal ini di sebabkan adanya kemungkinan penduduk Nigeria yang masih memiliki beberapa pekerjaan yang tidak menentu dan memperbaiki kondisi hidup mereka sehingga dapat keluar dari kemiskinan padahal tidak di pekerjakan secara resmi. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tidak

dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Nigeria karena keadaan yang tidak memungkinkan di negara Nigeria.

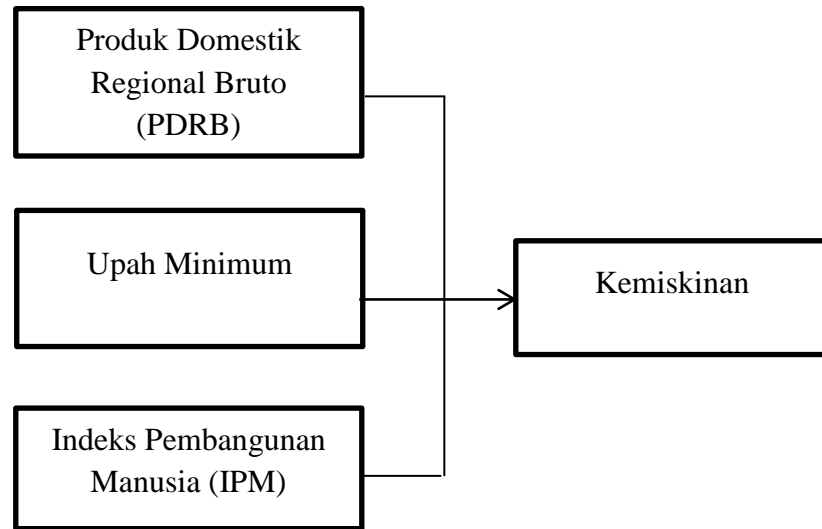
10. Khalil Ahmad (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dampak variabel makroekonomi terhadap kemiskinan di Pakistan. Makroekonomi dalam penelitian ini yaitu pendidikan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 1974-2009. Pendekatan kointegrasi *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* dipilih sebagai alat analisis.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam jangka pendek maupun jangka panjang pendidikan berhubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini terjadi karena kesalahan data makroekonomi pendidikan yang digunakan dalam penelitian, sedangkan pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan di Pakistan dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Pakistan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dari landasan teori dan penelitian terdahulu maka peneliti menyusun kerangka pemikiran yang menjadi sebuah dasar hubungan antar variabel dependen dan independen sebagai berikut :



Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun hipotesa sebagai berikut :

1. Diduga variabel Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.
2. Diduga variabel Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan.
3. Diduga variabel Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.